

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir, Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.
- Djamali, R. Abdoel. *Pengantar Hukum Indonesia*. Cetakan 8. Jakarta: Raja Grafindo, 2003.
- Djubaedah, Neng. *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Galang, Suteki;Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik)*. Depok: Rajawali Press, 2018.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.
- Harjono. *Perlindungan Hukum (Membangun Sebuah Konsep Hukum) – Dalam Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*. Jakarta: Sebagai Rumah Bangsa, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008.
- Ishaq, H. *Metode Penelitian Hukum Penulisan Skripsi, Tesis, Dan Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- M. Hadjon, Philipus. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*. Jakarta: Bina Ilmu, 1987.
- Mahkamah Agung RI, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Buku II*. Edisi Revi. Jakarta, 2013.
- Raharjo, Satjipto. *Permasalahan Hukum Di Indonesia*. Bandung: Alumni, 1983.
- . *Sisi-Sisi Lain Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2003.
- Ramulyo, Moh. Idris. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004.

Soimin, Soedharyo. *Hukum Orang Dan Keluarga, Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, Dan Hukum Adat*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

B. Makalah, Artikel dan/atau Jurnal

Asnawi, Habib Shulton. "Politik Hukum Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Di Luar Nikah: Upaya Membongkar Positivisme Hukum Menuju Perlindungan HAM." *Jurnal Konstitusi* 10, no. 2 (2016): 239.

Dumyati, S. Sos. I., M. Sii. "Analisis Kinerja Pegawai Dalam Memberikan Pelayanan Pembuatan Kartu Keluarga (KK) Di Kantor Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir." *Jurnal Ilmiah Administrasi Dan Sosial* 15, no. 16 (November 16, 2020). Accessed October 3, 2022. <http://ejournal-satyanegara.ac.id/index.php/satyanegara/article/view/9>.

Faizal, Liky. "Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan." *Asas: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2016). Accessed May 23, 2022. <http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1247/987>.

Nugroho, Hafidz, and Imelda Martinelli. "Akibat Hukum Penolakan Permohonan Itsbat Nikah Oleh Pengadilan Agama Terhadap Para Pihak Yang Melakukan Nikah Siri (Studi Kasus Putusan Nomor: 1478/Pdt.G/2016/PAJT)." *Jurnal Hukum Adigama* 1, no. 2 (2018): 49.

Prasetyo, Agung Basuki, Jl Soedarto, and Tembalang Semarang. "Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Secara Administratif Pada Masyarakat Adat." *Online Administrative Law & Governance Journal* 2, no. 1 (2020): 2621–2781.

Putri, Monica. "Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII 2010 Terhadap Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan (Putusan Sengketa Antara Jessica Iskandar Dengan Ludwig Franz Willibald Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 586/Pdt.G/2014/PN Jaksel)" IV, no. 1 (2016): 134–141.

Rif'atul Khusnia, Yuliati, Hendrarto Hadisuryo. "Perlindungan Hukum Bagi Istri Dan Anak Dalam Perkawinan Tidak Dicatat Terhadap Hak Warisnya." *Jurnal Hukum.Ub.Ac.Id* (2015): 1–22.

Rohman, Moh. Faizur. "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan Terhadap Tujuan Perkawinan." *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 7, no. 1 (September 19, 2017): 1–27. Accessed December 27, 2022. <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/aldaulah/article/view/446>.

- Sardjono, R. “Berbagai Masalah Hukum Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Fakultas Hukum dan Pengetahuan Kemasyarakatan Universitas Trisakti Jakarta* (n.d.): 6.
- Sendy, Beby. “Hak Yang Diperoleh Anak Dari Perkawinan Tidak Dicatat.” *Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB* 7, no. 7 (2019): 1–13.
- Setiawan, Yusup, Stai Dr, Ez Kh, and Indonesia Muttaqien Purwakarta. “Analisa Pencatatan Nikah (Kawin Belum Tercatat) Pada KK Dalam Perspektif Disdukcapil Purwakarta.” *Muttaqien; Indonesian Journal of Multidiciplinary Islamic Studies* 3, no. 2 (July 30, 2022): 195–218. <http://e-jurnal.staimuttaqien.ac.id/index.php/mtq/article/view/581>.
- Sodiq, Muhammad. “Dualisme Hukum Di Indonesia: Kajian Tentang Peraturan Pencatatan Nikah Dalam Perundang-Undangan.” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 2 (May 10, 2016): 109.
- Usman, Rachmadi. “Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia” (2017). Accessed December 30, 2022. <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/jurnal/index.php/jli/article/view/43/24>.
- Wardhana, Andreas Satya. “Pengaturan Lembaga Pengakuan Anak Sebagai Wujud Perlindungan Hukum Bagi Anak Luar Kawin” (2016).
- Zega, Ayu Rahmayani. “Pelaksanaan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.471.13/2051/ Dukcapil Tentang Penerbitan Surat Keterangan Sebagai Penganti Ktp-El Maupun Surat Keterangan Telah Terdata Dalam Database Kependudukan (Studi Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan)” (February 20, 2017). Accessed January 24, 2023. <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/12113>.

C. Skripsi/Tesis/Disertasi

- Muchsin. *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia. Disertasi S3 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret*. Surakarta, 2003.

D. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Kompilasi Hukum Islam.

E. Website

MYC. “Surat Edaran, ‘Kerikil’ Dalam Perundang-Undangan.” *11 Januari*. Last modified 2015. <https://www.hukumonline.com/berita/a/surat-edaran--kerikil-dalam-perundang-undangan-lt54b1f62361f81>.

Semarang, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota. “Kartu Keluarga.” Last modified 2022. Accessed December 30, 2022. <https://www.dispendukcapil.semarangkota.go.id/halaman-Kartu-Keluarga>.

Statistik, Badan Pusat. “Istilah.” Accessed October 3, 2022. <https://www.bps.go.id/istilah/index.html?Istilah%5Bkatacarian%5D=kawin&yt0=Tampilkan>.

———. “Istilah.” Accessed October 3, 2022. [https://www.bps.go.id/istilah/index.html?Istilah%5Bkatacarian%5D=Cerai#:~:text=Cerai hidup adalah status dari,walaupun belum resmi secara hukum](https://www.bps.go.id/istilah/index.html?Istilah%5Bkatacarian%5D=Cerai#:~:text=Cerai%20hidup%20adalah%20status%20dari,walaupun%20belum%20resmi%20secara%20hukum).